

***COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT
IN KOTA RAJA VILLAGE, AMUNTAI SELATAN SUB-DISTRICT,
HULU SUNGAI UTARA REGENCY***

Muhamad Arsyad¹

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: arsyadhstu@gmail.com

Submitted: 5/8/2025; Revised: 15/8/2025; Accepted: 19/8/2025;

ABSTRAK

Permasalahan rendahnya kehadiran dalam kegiatan pembangunan, tidak adanya partisipasi finansial dan ketergantungan kepada dana desa. Penelitian ini mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan faktor mempengaruhinya. Pendekatan kualitatif menjadi pilihan dalam penelitian ini. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengumpulan dokumen dan observasi terlibat. Sumber data diambil secara purposive berjumlah 6 orang. Data dianalisis dengan teknik domain dan taksonomi. Hasil penelitian partisipasi masyarakat cukup baik. Indikator baik: akses informasi, keterlibatan kepanitiaan, keterlibatan monitoring, feedback, pemanfaatan fasilitas, keterjangkauan hasil, dan peningkatan aktivitas ekonomi/pendidikan/kesehatan. Indikator cukup baik: kehadiran musyawarah, konsultasi publik, keterlibatan evaluasi dan pemeliharaan. Indikator kurang baik: kehadiran fisik, partisipasi dana. Faktor pendorong adanya kepentingan dan kebutuhan kelompok, peran tokoh masyarakat, peran aktif pemerintah desa, imbalan partisipasi, pemahaman manfaat. Faktor penghambatnya sikap individualisme, ketergantungan insentif, dan persepsi bahwa tugas ditangani orang lain. Disarankan memberikan edukasi, pendekatan intensif, meningkatkan kebersamaan dan keterbukaan, meluangkan waktu untuk kegiatan sosial.

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan Desa

ABSTRACT

The problems identified in this study are low attendance in development activities, lack of financial participation, and dependence on village funds. This study aims to examine community participation in village development and the factors that influence it. A qualitative approach was used. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and participant observation. Data sources were selected purposively, involving six participants. Data analysis was conducted using domain and taxonomy techniques. The results show that community participation is fairly good. Good indicators include access to information, involvement in committees, participation in monitoring, feedback, use of facilities, accessibility of results, and improvements in economic, educational, and health activities. Moderately good indicators include attendance at meetings, public consultations, involvement in evaluation, and maintenance activities. Poor indicators include physical attendance and financial participation. The driving factors are group interests and needs, the role of community leaders, the active role of the village government, participation incentives, and understanding the benefits of development. The inhibiting factors are individualism, dependency on incentives, and the perception that responsibilities are handled by others. It is recommended to provide education, apply intensive engagement strategies, strengthen togetherness and transparency, and encourage people to make time for social activities.

Keywords: Participation, Village Development

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah upaya untuk menentukan masa depan yang lebih baik, terukur dan terarah. Pembangunan berarti melakukan serangkaian upaya untuk melakukan perubahan dan pertumbuhan secara sadar dengan tujuan untuk kemajuan bangsa menjadi bangsa yang modern. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), memberikan gambaran tentang perencanaan pembangunan di Indonesia yang mengedepankan adanya partisipasi masyarakat, masyarakat diberi kesempatan berkontribusi terhadap pembangunan. Kewajiban masyarakat desa untuk berpartisipasi termaktub dalam peraturan yang berhubungan langsung dengan pemerintahan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal 68 ayat (2) huruf (e) disebutkan tentang kewajiban masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Diantara bentuk partisipasi masyarakat yang bisa diberikan yaitu dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang terarah, terpadu dan berkelanjutan guna percepatan pembangunan di Daerah.

Desa Kota Raja merupakan salah satu desa berprestasi, baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat. Prestasi tersebut didapat berkat kerja keras perangkat desa, dukungan BPD, para Ketua RT, kader PKK, Posyandu, Karang Taruna dan Kader Desa. Prestasi tersebut juga diraih setelah keberhasilan Desa Kota Raja dalam menghadirkan berbagai inovasi dan program, seperti pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, data dan fasilitas desa yang lengkap. Hal ini memberi gambaran adanya partisipasi masyarakat Desa Kota Raja dalam pembangunan. Diantara bentuk partisipasi yang diberikan adalah kegiatan musyawarah desa, gotong royong, menjaga keamanan & ketertiban masyarakat dan berperan dalam kegiatan keagamaan seperti syarikat kematian, habsyi dan kegiatan keagamaan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan ditemukan permasalahan sebagai berikut: *Pertama* masih rendahnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa Kota Raja, seperti gotong royong membersihkan saluran air, perbaikan jalan dan fasilitas desa. *Kedua* tidak adanya partisipasi finansial yang diberikan masyarakat untuk kegiatan yang berkaitan dengan Pembangunan di desa Kota Raja, padahal keuangan desa sangat terbatas untuk membiayai berbagai kegiatan. *Ketiga* ketergantungan masyarakat kepada dana desa dalam pemeliharaan pembangunan, menyebabkan rendahnya keterlibatan dalam pemeliharaan hasil pembangunan dan sulitnya meningkatkan kesadaran warga dalam pemeliharaan.

Penelitian terdahulu yang penulis gunakan adalah: (1) Gunanta Ginting, Aos Kuswandi dan Ayuning Budiati (2024), judul: Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh Dan Tantangan. Menyoroti rendahnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan

pembangunan di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang. Beberapa kendala utama antara lain waktu musyawarah yang tidak sesuai dengan rutinitas petani, rendahnya pendidikan masyarakat, serta minimnya akses terhadap informasi pembangunan. Akibatnya, kebijakan pembangunan kerap tidak mencerminkan kebutuhan nyata warga, berujung pada pemborosan anggaran dan hasil yang kurang optimal. Tujuan dari studi ini adalah mengevaluasi sejauh mana partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian menemukan bahwa meskipun tahapan musyawarah telah berjalan sesuai aturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat tetap terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman warga tentang pentingnya keterlibatan mereka, keterbatasan kemampuan teknis dan ekonomi, serta kurangnya transparansi dari pemerintah desa, termasuk tidak tersedianya sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. (2) Penelitian yang dilakukan oleh Noviar dan Priyanti (2023), judul: Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Berangkat dari persoalan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur. Permasalahan utama adalah masih kuatnya pendekatan top-down dalam proses perencanaan desa, serta belum optimalnya keterlibatan kolaboratif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teori Cohen dan Uphoff tentang partisipasi kolaboratif (pengambilan keputusan, pelaksanaan, kepuasan, dan evaluasi), penelitian ini menemukan bahwa Musrenbang desa memang dilaksanakan, namun hanya setahun sekali dan hanya dihadiri perwakilan dari tiap dusun, bukan seluruh masyarakat. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dianggap kurang merata dan belum mencerminkan partisipasi sejati warga. Dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat juga terbatas akibat tidak tersedianya sarana aspirasi yang memadai, serta sistem pelayanan dan informasi berbasis daring (online) yang belum berjalan baik. Ini turut memengaruhi rendahnya keterlibatan masyarakat. Sementara dari sisi kepuasan, warga merasa belum menerima manfaat yang signifikan. Adapun evaluasi terhadap partisipasi warga masih bersifat rencana dan belum diwujudkan, seperti rencana peningkatan layanan online dan fasilitas publik yang masih dalam tahap perencanaan.

Adapun penelitian ini difokuskan pada teori Theresia. et. al (2014) dalam (Hajar *et al.*, 2018) terkait dengan kegiatan yang menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi pada saat pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan partisipasi pemanfaatan hasil pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengetahui factor-faktor yang memengaruhinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Dipilihnya metode kualitatif karena penulis memandang permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis, sehingga data yang diperoleh dari para informan dilakukan dengan cara alamiah yaitu *interview* langsung, sehingga mendapatkan jawaban yang alamiah (apa adanya). Selain itu penulis bermaksud memahami situasi sosial lebih mendalam, menemukan pola hepotesis dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan, sehingga memperoleh informasi yang jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sumber data diambil dari para informan berjumlah 6 (enam) orang dengan metode *purposive* (mekanisme disengaja) yang terdiri dari unsur aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Karang Taruna. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, pengumpulan dokumen dan melakukan observasi terlibat. Teknik analisis data menggunakan analisis domain dan analisis taksonomi, Spradley (1997:117-119) dalam (Afrizal, 2019). Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi agar mendapatkan data yang valid, kuat dan yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.

PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini, penulis mengacu pada teori Theresia. et. al (2014) dalam (Hajar *et al.*, 2018) terkait dengan kegiatan yang menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. *pertama*: partisipasi dalam pengambilan keputusan, penekanan teori ini adalah penting adanya forum yang mewadahi masyarakat untuk menyalurkan ide, gagasan, pendapat dan keinginan mereka, sehingga dapat menampung lebih banyak masukan untuk program-program pembangunan, bahkan bukan hanya sekedar menampung masukan, akan tetapi tempat mencari solusi terhadap persalahaan bersama dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. *Kedua* partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa semestinya ada pemerataan sumbangsih masyarakat dalam pembangunan berupa tenaga kerja, uang dan atau berbagai bentuk kontribusi lainnya yang seimbang dengan manfaat yang diterima oleh masing-masing anggota masyarakat. Peluang masyarakat dalam berpartisipasi hendaknya diperluas sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing, agar tidak terjadi ketidakseimbangan manfaat yang mereka dapatkan. *Ketiga* partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, masyarakat memiliki peran sebagai pengawas pertama dalam pembangunan, posisi strategis masyarakat sebagai garda terdepan dalam memberikan pengawasan dan evaluasi. Hal ini penting agar tercipta transparansi, efektivitas dan akuntabilitas dalam semua program pembangunan, khususnya yang berhubungan langsung dengan hajat dan kebutuhan mereka. Disisi lain juga penting adanya umpan balik masyarakat agar menjadi bahan masukan berharga bagi pemerintah desa untuk keberhasilan pembangunan. *Keempat*:

partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Menjadi “PR (Pekerjaan Rumah)” bagi masyarakat setelah pembangunan dilaksanakan adalah berkaitan dengan pemanfaatan hasil pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk kepentingan ekonomi, pendidikan dan kesehatan mereka. Diperlukan kerjasama semua masyarakat dalam menjaga fasilitas pembangunan yang ada agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak orang.

Menampilkan 15 indikator yang menjadi acuan penulis dalam menilai partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Kota Raja. *Pertama* sub variable partisipasi dalam pengambilan keputusan: indikator kehadiran dalam musyawarah cukup baik, kehadiran terdiri dari unsur kepala desa, sekretaris desa, semua kepala urusan, ketua RT, BPD, LKMD, perwakilan kelompok tani dan perikanan. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi tinggi dengan adanya keterwakilan dari setiap kelompok, akan tetapi kehadiran perwakilan RT sangat rendah, hanya sekitar 25% karena alasan pekerjaan dan agenda rapat terbentur dengan jam kerja warga dan terkadang rapat dilaksanakan malam hari. Indikator akses informasi sudah baik, karena Pemerintah Desa Kota Raja menggunakan media sosial dan komunikasi tatap muka sebagai saluran utama penyebaran informasi pembangunan, namun masih terdapat kesenjangan akses terutama pada kalangan orang tua yang kurang literasi digital. Pendekatan melalui RT, BPD, dan Karang Taruna memperkuat distribusi informasi secara merata di berbagai wilayah desa. Media sosial dan WhatsApp adalah saluran utama penyebaran informasi pembangunan desa. Ketua RT, BPD, Karang Taruna, dan tempat ibadah memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat secara langsung. Ada perubahan pola komunikasi dari media cetak (brosur) ke media digital. Indikator konsultasi publik cukup baik, konsultasi publik biasanya dilakukan secara berjenjang dari ketua RT ataupun BPD yang menerima aspirasi warganya, kemudian disampaikan kepada kepala desa, akan tetapi tidak pernah dilakukan dalam forum khusus konsultasi publik. Beberapa kasus memerlukan konsultasi teknis dengan ahli untuk menemukan solusi pembangunan yang aman dan efektif (contoh kasus jalan ambles). Konsultasi publik tidak selalu berupa forum khusus, tetapi terintegrasi dalam forum rutin seperti musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). *Kedua* sub variabel partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, indikator kehadiran fisik kurang baik, tingkat kehadiran fisik masyarakat rendah dalam pembangunan desa yang didanai APBDes. Masyarakat merasa itu adalah tanggung jawab pemerintah. Hambatan utama partisipasi adalah kesibukan warga dan rendahnya kesadaran kolektif tanpa imbalan. Mereka enggan turut membantu secara fisik, akan tetapi partisipasi meningkat dalam situasi darurat (bencana alam, musibah) atau kegiatan sosial keagamaan yang tidak didanai oleh pemerintah. Linmas (Perlindungan Masyarakat) menjadi aktor utama yang dilibatkan, karena kehadiran mereka diberikan upah/insentif. Warga yang memiliki keahlian khusus (seperti tukang) dilibatkan dalam proyek swakelola. Karang Taruna aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, tetapi tidak banyak terlibat dalam pembangunan fisik desa. Indikator partisipasi dana kurang baik, karena adanya anggapan bahwa kebutuhan dana untuk kegiatan pembangunan dan gotong royong

yang berkaitan dengan pemerintahan desa sudah disediakan, anggapan masyarakat bahwa hal itu tidak membutuhkan bantuan dari warga. Dana atau harta masyarakat lebih mudah dikumpulkan untuk kegiatan keagamaan atau sosial, seperti pembangunan mushala atau acara hari besar agama. Ada contoh positif kolaborasi dana warga dan dana desa pada pembangunan gapura, menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang baik, partisipasi dana bisa ditingkatkan. Sumbangan non-dana (seperti makanan/minuman) pada kegiatan gotong royong masih terjadi, meskipun skalanya kecil. Pada indikator keterlibatan dalam kepanitiaan sudah baik, karena menyesuaikan dengan kebijakan terbaru pasca 2022 tidak ada lagi tim pelaksana formal untuk pembangunan fisik, diganti oleh pelaksana dari perangkat desa yaitu Kaur Umum dan Perencanaan, adapun masyarakat hanya terlibat dalam kepanitiaan kegiatan desa diluar dari pembangunan fisik. Masyarakat umum, Karang Taruna, dan RT tidak secara struktural masuk kepanitiaan pembangunan fisik, namun berkontribusi dalam konteks non-fisik atau dukungan teknis. BPD berperan sebagai pengawas, bukan pelaksana. Pada proyek-proyek besar, Desa bisa menunjuk pihak ketiga (swasta). Masyarakat lokal dilibatkan secara teknis sebagai tenaga kerja (tukang). *Ketiga* sub variabel partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi Pembangunan. indikator keterlibatan dalam monitoring sudah baik, karena monitoring pembangunan di Desa Kota Raja melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan pasif dalam bentuk evaluasi langsung, masukan teknis, serta kritik terhadap transparansi dan penggunaan anggaran. Tokoh masyarakat dan pemuda kritis berperan sebagai pengawas informal, sementara sebagian warga hanya memanfaatkan hasil pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme monitoring tinggi, terutama saat pembangunan berlangsung. Indikator adanya *Feedback* (Umpan Balik) sudah baik, *Feedback* merupakan masukan yang diberikan masyarakat terhadap hasil pembangunan sebagai bentuk perhatian atas telah terlaksananya kegiatan pembangunan dan menjadi dasar dalam penyusunan program berikutnya. Berbagai bentuk *feedback* diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah yang mencakup: masukan terhadap kualitas pembangunan yang kurang memadai, transparansi anggaran terkait pemasangan papan proyek yang kurang jelas, permintaan tambahan pembangunan, *feedback* administratif seperti pelaporan pajak, dan adanya masukan teknis dari warga yang memiliki keahlian. Indikator keterlibatan dalam evaluasi cukup baik, karena perwakilan masyarakat selalu hadir dalam rapat evaluasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi langsung memang tidak begitu banyak karena merasa bahwa pembangunan telah berjalan dengan baik. Keterlibatan warga dalam evaluasi diperlukan agar mendapatkan inventarisasi masalah dan mencari solusi bersama terhadap pembangunan desa. Kegiatan ini akan menjadi dasar dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. *Keempat* sub variabel partisipasi dalam pemanfaatan hasil Pembangunan. Indikator pemanfaatan fasilitas pembangunan sudah baik karena masyarakat dapat menikmati fasilitas berupa jalan, jembatan, alkah, JUT dan siring Sungai, sehingga mempermudah aktivitas warga sehari-hari. Fasilitas pembangunan di Desa Kota Raja telah memberikan dampak nyata dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan administrasi masyarakat, meskipun masih ada tantangan terkait pengelolaan lingkungan seperti drainase.

Pemerintah desa menerapkan skala prioritas dalam pembangunan agar manfaatnya dirasakan secara merata oleh warga. Indikator keterlibatan dalam pemeliharaan cukup baik, partisipasi warga belum merata dan masih terjadi ketergantungan pada insentif/upah yang diberikan oleh desa. Jika tidak ada dana yang disediakan oleh pemerintah desa maka keterlibatan masyarakat rendah. Indikator keterjangkauan hasil pembangunan sudah baik, diantara keberhasilan pembangunan adalah manfaat pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin, tidak terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan maupun perdesaan. Pembangunan sudah merata, tidak membedakan status sosial dan geografis. Indikator peningkatan aktivitas ekonomi/pendidikan/kesehatan sudah baik, adanya peningkatan aktivitas wirausaha warga, mudahnya akses ke sekolah dan adanya layanan kesehatan desa. Pembangunan di Desa Kota Raja memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, peningkatan akses dan fasilitas pendidikan, serta tersedianya layanan kesehatan yang merata. Hal ini didukung oleh pembangunan infrastruktur, pendirian BUMDes, serta pelatihan keterampilan bagi warga. Dalam bidang ekonomi warga makin banyak berwirausaha dapat dilihat dengan banyak berdiri toko, mini market dan usaha kue, adanya BUMDes mendukung usaha kecil dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta infrastruktur seperti tanggul banjir dan jalan membantu kelancaran usaha. Bidang pendidikan tersedia PAUD, Madrasah, SD, SMP, akses jalan yang baik mempermudah ke sekolah/pondok pesantren, serta adanya pelatihan keterampilan bagi berbagai kelompok usia. Dan pada bidang Kesehatan warga mendapat layanan kesehatan yang mudah diantaranya berupa ambulans gratis milik desa.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah *pertama* faktor pendorong yaitu (1) kepentingan dan kebutuhan kelompok, masyarakat berpartisipasi karena ada kepentingan kelompok seperti pelatihan, bantuan, atau kegiatan. Kebutuhan akan pelatihan-pelatihan menjadi sesuatu yang mutlak di era modern sekarang ini. Tenaga yang siap kerja sangat banyak, sedangkan lapangan pekerjaan sangat sedikit. Selain membekali masyarakat khususnya pemuda dengan skil yang memadai, juga membutuhkan adanya *backup* pendanaan dari pemerintah untuk pengembangan keterampilan mereka. (2) Peran tokoh masyarakat, tokoh masyarakat (RT, pemuda, pemimpin kelompok) berperan mengajak warga terlibat dalam pembangunan, tokoh masyarakat memiliki daya tarik tersendiri dibanding dengan warga biasa, sehingga peran mereka sangat dibutuhkan oleh desa. (3) Peran aktif pemerintah desa, pemerintah desa proaktif mengajak masyarakat untuk ikut rapat dan gotong royong, kesuksesan sebuah rencana pembangunan harus dioptimalkan oleh pelaksana pembangunan itu sendiri, sehingga berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi selalu dilakukan seperti turun langsung ke masyarakat untuk mengajak terlibat dalam pembangunan. (4) Imbalan dalam Partisipasi (Insentif), kehadiran masyarakat meningkat karena adanya uang saku atau konsumsi saat rapat, faktor insentif ini tidak bisa dihindari karena menyangkut kebutuhan masyarakat. (5) Pemahaman tentang manfaat Pembangunan, jika masyarakat paham manfaat program, mereka lebih terdorong

untuk ikut serta. Selain mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, tidak kalah penting juga adalah pemahaman mereka akan manfaat yang diperoleh dari partisipasi pembangunan tersebut. *Kedua* faktor penghambat, (1) Sikap individualisme/egoism sosial, masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarga daripada kepentingan umum yang berakibat pada rendahnya partisipasi mereka pada kegiatan-kegiatan desa. (2) kesibukan pribadi (pekerjaan, usaha), warga lebih memilih fokus pada pekerjaan atau usaha sehingga mengabaikan keterlibatan sosial. Mayoritas warga berprofesi sebagai ASN dan pedagang, sehingga kesibukan pribadi lebih dominan ketimbang kemasyarakatan. (3) Ketergantungan pada insentif finansial, ketergantungan pada upah jika ingin berpartisipasi menjadi factor penghambat yang dirasakan oleh pemerintah desa, karena dana yang dimiliki oleh desa sangat terbatas. (4) persepsi tugas sudah ditangani orang lain, ada anggapan bahwa tugas gotong royong sudah menjadi kewajiban petugas Linmas atau aparat. Persepsi ini yang terbangun di masyarakat sehingga menyebabkan mereka enggan ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong yang diadakan oleh desa.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. *Pertama* sub variable partisipasi dalam pengambilan keputusan: Indikator kehadiran musyawarah cukup baik, kehadiran unsur aparatur dan perwakilan kelompok cukup tinggi, namun perwakilan RT sangat rendah. Indikator akses informasi sudah baik, media sosial dan komunikasi tatap muka sebagai saluran utama penyebaran informasi pembangunan. Indikator konsultasi publik cukup baik, tidak ada forum khusus untuk konsultasi publik akan tetapi ada konsultasi berjenjang dari RT/BPD kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. *Kedua* sub variable partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan: indikator kehadiran fisik/partisipasi tenaga kurang baik, tingkat kehadiran secara fisik masyarakat rendah dalam pembangunan desa yang didanai APBDes. Indikator partisipasi dana/barang kurang baik karena adanya anggapan bahwa sudah disediakan dana kegiatan pembangunan dan gotong royong yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Indikator keterlibatan dalam kepanitiaan sudah baik karena pembangunan langsung dilaksanakan oleh Kaur Umum dan Perencanaan. *Ketiga* sub variable partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan: indikator keterlibatan dalam monitoring sudah baik, partisipasi masyarakat secara aktif dalam bentuk evaluasi langsung, masukan teknis, serta kritik terhadap transparansi dan penggunaan anggaran. Indikator adanya *feedback* (umpan balik) sudah baik, karena adanya masukan terhadap kualitas pembangunan, transparansi anggaran, permintaan tambahan pembangunan, adanya masukan teknis dari warga yang memiliki keahlian. Indikator keterlibatan dalam evaluasi cukup baik, karena sedikit keterlibatan masyarakat dalam evaluasi secara langsung tetapi perwakilan mereka selalu hadir dalam rapat evaluasi. *Keempat* sub variable partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan: indikator pemanfaatan fasilitas pembangunan sudah baik, masyarakat dapat menikmati fasilitas berupa jalan, jembatan, alkah, JUT dan siring Sungai. Indikator keterlibatan dalam pemeliharaan cukup baik,

partisipasi warga belum merata dan masih terjadi ketergantungan pada insentif/upah yang diberikan oleh desa. Indikator keterjangkauan hasil pembangunan sudah baik, pembangunan sudah merata, tidak membedakan status sosial dan geografis. Indikator peningkatan aktivitas ekonomi/pendidikan/kesehatan sudah baik, sudah ada peningkatan aktivitas wirausaha warga, mudahnya akses ke sekolah dan adanya layanan kesehatan desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut: *pertama* faktor pendorong yang terdiri dari adanya kepentingan dan kebutuhan kelompok, peran tokoh masyarakat, peran aktif pemerintah desa, imbalan dalam partisipasi (insentif), dan pemahaman tentang manfaat pembangunan. *Kedua* faktor penghambat yaitu: adanya sikap individualisme/egoisme sosial, kesibukan pribadi (pekerjaan, usaha), ketergantungan pada insentif finansial, dan adanya persepsi bahwa tugas sudah ditangani orang lain.

Esensi dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Tingkat partisipasi masyarakat Desa Kota Raja sangat *variative* tergantung tahapan pembangunan. Model partisipasi berjenjang dan *representative*, masyarakat tidak terlibat langsung dalam seluruh proses, namun menggunakan pola konsultasi bertingkat melalui RT dan BPD. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi langsung efektif dalam penyebaran informasi. Rendahnya keterlibatan fisik dan finansial perlu diperhatikan, minimnya kehadiran fisik dan kontribusi barang/dana dalam pelaksanaan pembangunan mencerminkan tantangan dalam mendorong rasa tanggung jawab kolektif. Warga terlibat aktif dalam bentuk umpan balik terhadap kualitas pembangunan dan transparansi anggaran. Pembangunan telah berdampak pada akses dan aktivitas sosial-ekonomi. Partisipasi masih bergantung pada insentif dan tokoh penggerak. Sikap individualisme dan persepsi delegatif menjadi hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim (2004) 'Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)'.

Anonim (2014b) 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa'.

Anonim (2017) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah'.

Anonim (2019) 'Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2019 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan'.

Bihamding, H. (2019) *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Deepublish.

Ginting, G., Kuswandi, A. and Budiati, A. (2024) 'Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh dan Tantangan', *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), pp. 112–124. Available at: <https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.1084>.

Hajar, S. *et al.* (2018) *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. 1st edn. Edited by Syafrida Hani. Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli.



Kessa, wahyudin (2015) *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Noviar, I. and Priyanti, E. (2023) 'Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa', 8..

Ridwan, T. (2025) 'Bupati HSU: Musrenbang fokus jadi Pusat Agrominapolitan Penopang Logistik Kalsel', <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/456937/bupati-hsu-musrenbang-fokus-jadi-pusat-agrominapolitan-penopang-logistik-kalsel>, 25 April.

Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.